



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. PANGANDARAN



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

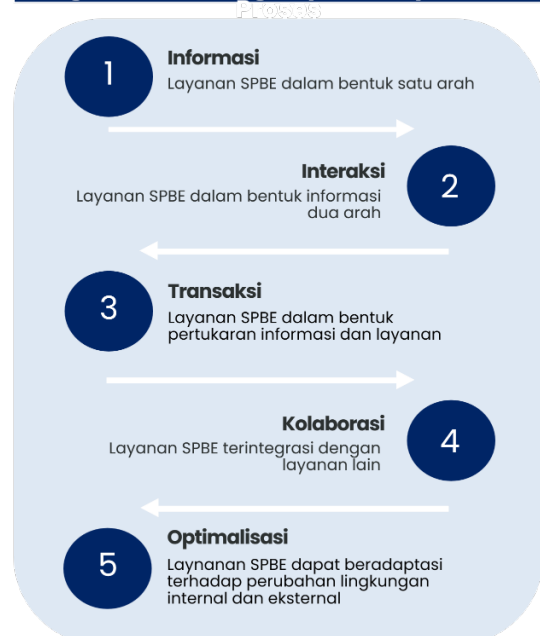
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



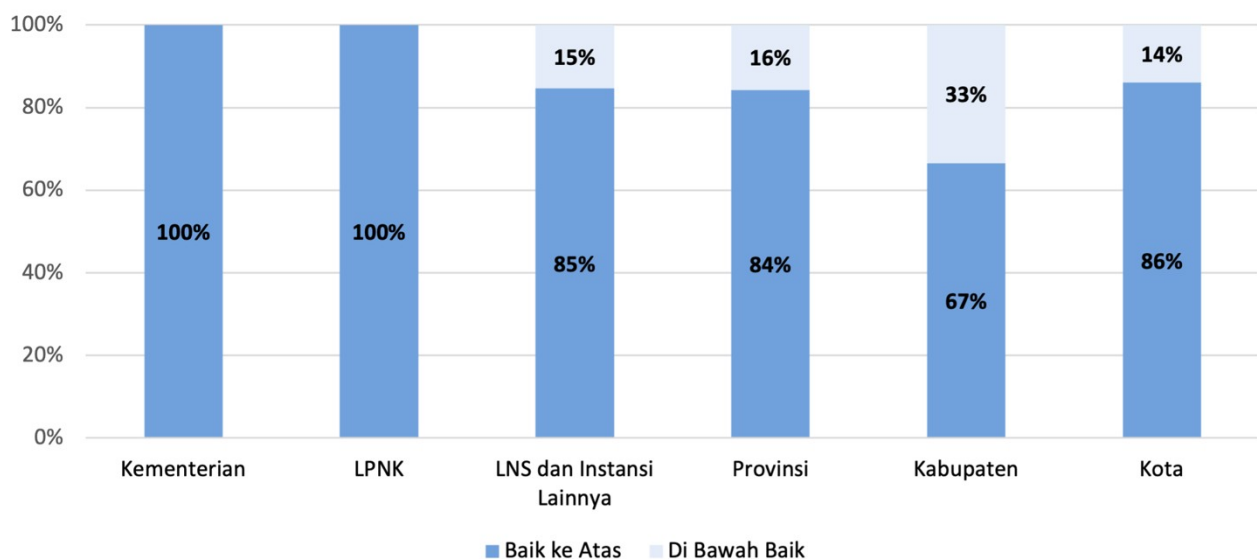
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

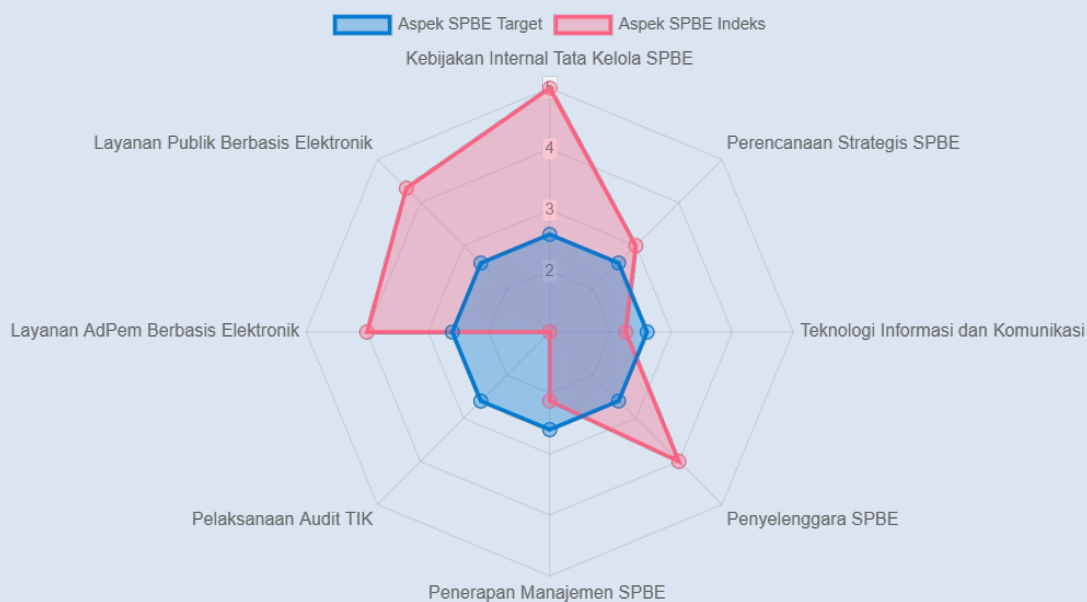
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,55
Domain Kebijakan SPBE	5,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>5,00</i>
Domain Tata Kelola SPBE	2,90
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>3,00</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>2,25</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>4,00</i>
Domain Manajemen SPBE	1,82
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>2,13</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>1,00</i>
Domain Layanan SPBE	4,13
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>4,00</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>4,33</i>

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE pada Pemkab Pangandaran yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Pangandaran adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Pangandaran.
- Kelemahan
Pemkab Pangandaran tidak memiliki kelemahan di aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Pemkab Pangandaran yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Pangandaran adalah dengan adanya Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE..

- Kekuatan
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Arsitektur SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Pangandaran.
- Kelemahan
Namun di sisi lain, Pemkab Pangandaran masih belum memiliki dokumentasi tata kelola terkait Rencana dan Anggaran SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE, di mana pengaturan yang disampaikan belum memenuhi kriteria kematangan lebih dari tingkat 2.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemkab Pangandaran yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Pangandaran adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, dan Penggunaan Sistem Penghubung..

- Kekuatan
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Pangandaran.
- Kelemahan
Pemkab Pangandaran masih belum memiliki dokumentasi tata kelola terkait Layanan Jaringan Intra dan Penggunaan Sistem Penghubung, di mana pengaturan yang disampaikan belum memenuhi kriteria kematangan lebih dari tingkat 2.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Penyelenggara SPBE pada Pemkab Pangandaran yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Pangandaran adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Pangandaran.
- Kelemahan
Pemkab Pangandaran masih belum memiliki dokumentasi tata kelola terkait Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE, di mana pengaturan yang disampaikan belum memenuhi kriteria kematangan lebih dari tingkat 2.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Pemkab Pangandaran yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Pangandaran adalah dengan adanya Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Aset TIK, dan Manajemen Sumber Daya Manusia..

- Kekuatan

Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Pangandaran.

- Kelemahan

Pemkab Pangandaran masih belum memiliki penerapan terkait Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE., di mana pengaturan yang disampaikan belum memenuhi kriteria kematangan lebih dari tingkat 2.

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan Aspek Pelaksanaan Audit TIK pada Pemkab Pangandaran belum ada satu pun indikator yang memenuhi.

- Kekuatan

Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK ini belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Pangandaran.

- Kelemahan

Pemkab Pangandaran masih belum memiliki penerapan terkait Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE., di mana tidak ditemukan adanya bukti dukung pelaksanaan audit.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemkab Pangandaran yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Pangandaran adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara, Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai..

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, dan Layanan Kinerja Pegawai. menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Pangandaran. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan aplikasi umum atau berbagi pakai.

- Kelemahan

Pemkab Pangandaran tidak memiliki kelemahan di aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Pemkab Pangandaran yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Pangandaran adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektoral 1, Layanan Publik Sektoral 2, dan Layanan Publik Sektoral 3.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektoral 1, Layanan Publik Sektoral 2, dan Layanan Publik Sektoral 3. menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Pangandaran.

- Kelemahan

Pemkab Pangandaran tidak memiliki kelemahan di aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Pemkab Pangandaran tahun 2024, secara prinsip penerapan kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE telah mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara signifikan. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemkab Pangandaran, dapat menggambarkan predikat "Baik" dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Beberapa aspek yang menjadi keunggulan dalam penerapan SPBE di Pemkab Pangandaran adalah Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan dan Layanan Publik. Hal ini terlihat dari telah tersedianya kebijakan internal yang komprehensif mencakup Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan berbagai kebijakan terkait manajemen SPBE lainnya yang telah mencapai tingkat kematangan 5. Pada aspek layanan, Pemkab Pangandaran telah berhasil mengimplementasikan berbagai layanan berbasis elektronik seperti SIPD untuk perencanaan dan penganggaran, SIASN untuk kepegawaian, serta OSS dan SICANTIK untuk layanan perizinan yang telah terintegrasi dengan sistem nasional.

Di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan peningkatan, terutama pada aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Pelaksanaan Audit TIK. Beberapa manajemen SPBE seperti manajemen data, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan masih berada pada tingkat kematangan 1-2. Selain itu, pelaksanaan audit TIK baik untuk infrastruktur, aplikasi maupun keamanan SPBE juga masih berada pada tingkat kematangan 1.

Untuk perbaikan ke depan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Penguatan implementasi berbagai manajemen SPBE melalui penyusunan kebijakan operasional dan pedoman teknis yang lebih detail serta pelaksanaan yang konsisten.
2. Pengembangan kapasitas tim audit internal TIK dan pelaksanaan audit secara berkala untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem.
3. Optimalisasi pemanfaatan berbagai aplikasi umum yang telah digunakan dengan melakukan integrasi antar sistem dan pengembangan fitur sesuai kebutuhan.
4. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi pusat maupun daerah lain dalam penerapan SPBE untuk berbagi pengalaman dan praktik baik.
5. Penguatan monitoring dan evaluasi penerapan SPBE secara berkala untuk memastikan efektivitas implementasi dan perbaikan berkelanjutan.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan implementasi SPBE di Pemkab Pangandaran dapat semakin optimal dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024